



## Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Andini Agisti Yunita Utami

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Bekasi, Indonesia

E-mail: [andiniagistiyu@student.esaunggul.ac.id](mailto:andiniagistiyu@student.esaunggul.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-03-27 Revised: 2023-05-22 Published: 2023-06-04 <b>Keywords:</b> <i>Institutional Ownership; Managerial Ownership; Size Of Directors; Proportion Of Independent Commissioners; Audit Committee; Tax Evasion.</i>	The purpose of this research is to find out and analyze institutional ownership, managerial ownership, board size, proportion of independent commissioners and audit committees simultaneously and partially on tax evasion in mining companies on the IDX for the 2017-2021 period. The research was carried out using a quantitative approach with samples analyzed, namely 22 companies. So that the data analyzed in this study amounted to 110 financial report data. The data analysis technique was performed by multiple linear regression analysis. The results show that the size of the board of directors has a significant effect on tax evasion, while institutional ownership, managerial ownership, the proportion of independent commissioners and audit committees have no significant effect on tax evasion in mining companies on the IDX for the 2017-2021 period.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-03-27 Direvisi: 2023-05-22 Dipublikasi: 2023-06-04 <b>Kata kunci:</b> <i>Kepemilikan Institusional; Kepemilikan Manajerial; Ukuran Direksi; Proporsi Dewan Komisaris Independen; Komite Audit; Penghindaran Pajak.</i>	Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di BEI periode 2017-2021. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang dianalisis yaitu 22 perusahaan. Sehingga data yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 110 data laporan keuangan. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran direksi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di BEI periode 2017-2021.

### I. PENDAHULUAN

Pajak sebagai bentuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan pribadi maupun badan pada negara untuk kepentingan bersama. Akan tetapi, besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan kepada negara membuat munculnya beberapa tindakan yang memiliki tujuan untuk menguntungkan pribadi maupun golongan dengan melakukan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak sebagai istilah suatu strategi mengurangi beban pajak perusahaan melalui beberapa perencanaan pajak, baik yang termasuk dalam pengelakan pajak maupun yang tidak (Firmansyah et al., 2022). Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan melakukan rekayasa biaya-biaya yang tidak semestinya dan dibebankan untuk mengurangi pendapatan. Tindakan ini sering dilakukan dengan menyembunyikan sebagian pendapatan yang seharusnya dilaporkan.

Tindakan penghindaran pajak sering terjadi pada beberapa perusahaan yang sudah listing di Indonesia, tidak terkecuali perusahaan pertambangan. Dikutip dari katadata.com sektor

pertambangan dan penggalan tumbuh 7,78% secara tahunan (year-on-year) pada kuartal III tahun 2021. Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak 1995. Pada kuartal III tahun 2021, pertambangan sektor bijih logam tumbuh 24,73% secara tahunan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan besar dalam produksi tembaga dan emas. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan 18,08% pada kuartal II tahun 2021. Industri batu bara dan lignit tumbuh sebesar 14,95% pada triwulan III tahun 2021 karena adanya peningkatan produksi batu bara. Pada triwulan II tahun 2021, sektor ini tumbuh sebesar 13,27%.

Namun, pertumbuhan perusahaan pertambangan tidak beriringan dengan kepatuhan dalam membayar kewajibannya yaitu pajak. Effective Tax Rates (ETR) merupakan proksi yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak perusahaan. Semakin besar nilai ETR maka tingkat penghindaran pajaknya semakin kecil begitu juga sebaliknya bahwa

semakin kecil nilai ETR akan menunjukkan semakin besar pula penghindaran pajaknya.

**Tabel 1.** Penghindaran Pajak Perusahaan Pertambangan Periode 2017-2021

Perusahaan	Tahun	Tax Expense	Pretax income	ETR
ADRO	2021	457.658	1.486.251	0,308
	2020	63.660	222.165	0,287
	2019	224.101	659.103	0,340
	2018	343.457	820.998	0,418
	2017	393.093	929.531	0,423
ARII	2021	4.467	5.385	0,830
	2020	-1.513	-17.918	0,084
	2019	159	-5.696	-0,028
	2018	509	-28.767	-0,018
	2017	9.581	-7.136	-1,343
BSSR	2021	59.044.129	264.208.458	0,223
	2020	10.318.744	40.839.013	0,253
	2019	10.848.672	41.316.129	0,263
	2018	24.291.684	93.354.875	0,260
	2017	28.871.637	111.688.666	0,259
BUMI	2021	67.684.665	291.061.679	0,233
	2020	14.911.550	322.439.419	-0,046
	2019	28.486.579	-19.016.097	-1,498
	2018	8.611.227	166.829.576	0,052
	2017	66.978.827	309.725.010	0,216
INDY	2021	294.689.659	502.107.483	-0,587
	2020	1.232.649	119.737.447	-0,010
	2019	49.142.265	54.134.699	0,908
	2018	167.214.229	265.076.418	0,631
	2017	21.517.112	300.116.045	0,072
KKGI	2021	10.954.593	33.958.118	0,323
	2020	686.607	-9.354.622	-0,073
	2019	2.615.158	8.029.510	0,326
	2018	644.243	1.119.843	0,575
	2017	6.197.032	19.637.007	0,316

Sumber: [www.idx.com](http://www.idx.com) diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai ETR perusahaan pertambangan relatif tinggi. PT. Indika Energy Tbk (INDY) mengalami penurunan ETR yang signifikan dari tahun 2020-2021. Perusahaan lain yang telah mengalami penurunan yaitu PT. Baramulti Suksessarana Tbk. Mengacu pada pendapat (Asroni, Nur, & Yuyetta, 2019) dimana nilai ETR berkisar antara 0-1, dimana semakin mendekati 0 atau semakin kecil, mencerminkan bahwa perusahaan gencar

dalam melakukan penghindaran pajak dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penghindaran pajak pada sector pertambangan cukup tinggi. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa masih terdapat perusahaan yang memiliki laba minus atau mengalami kerugian, sehingga besar pajak yang dibayarkan juga rendah.

Studi yang dilakukan (Afrika, 2021) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Bertolakbelakang dengan studi yang dilakukan (Zainuddin & Anfas, 2021), yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Faktanya juga prosentase kepemilikan institusional tinggi membuat pengaruhnya terhadap keputusan lebih kuat, salah satunya dalam tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional akan menekan manajemen untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan mengurangi beban pajak, agar mendapatkan profit yang lebih dan manager mendapatkan bonus (Rumapea, Elisabeth, & Monica, 2022).

Studi juga dilakukan (Setiawan, Wasif, Husen, Yuliansyah, & Pebriani, 2021) yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Bertolakbelakang dengan studi yang dilakukan (Niandari, Yustrianthe, & Grediani, 2020) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kasus dilapangan adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan melalui profit atas kepemilikan saham dan adanya bonus atas kinerja yang dicapai, membuat manajemen melakukan berbagai hal agar tujuannya tercapai, tidak terkecuali melakukan penghindaran pajak. Studi selanjutnya dilakukan (R. A. H. Putri & Chariri, 2017) yang memperoleh hasil bahwa ukuran direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Bertolakbelakang dengan studi yang dilakukan (Nanditama & Ardiyanto, 2021) yang membuktikan bahwa ukuran direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi, diketahui direksi memiliki peran penting dalam melakukan tindakan-tindakan memanipulasi pendapatan. Adanya motivasi agar perusahaan memiliki kinerja yang baik dan mendapatkan tambahan pendapatan, membuat direksi berani dalam pengambilan keputusan meskipun juga melanggar peraturan yang berlaku (Dewi, 2018).

Studi yang dilakukan (Nurul & Rachmawati, 2020) yang memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen juga berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan studi yang dilakukan (Susanti & Efendi, 2022) yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Prakteknya, dalam melakukan pengawasan atas keputusan komisaris independen mendapatkan banyak tekanan, terutama juga dari pemilik mayoritas perusahaan. Independensi dari dewan komisaris cenderung kurang, karena dalam pengangkatan menjadi dewan komisaris independen tidak berdasarkan pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, melainkan ditunjuk langsung oleh pihak-pihak mayoritas yang berdasarkan atas hubungan relasi dan politik (Rospitasari & Oktaviani, 2021).

Studi lain dilakukan (Waluyo, 2019) yang memperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Bertolakbelakang dengan studi yang dilakukan (Devi, Saefurrohman, Rosilawati, Utamie, & Hurhayati, 2022) yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Faktanya dalam penerapan GCG, tidak sedikit perusahaan dengan komite audit hanya sebagai pemenuhan regulasi. Peran komite audit dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas kurang akan dapat diandalkan karena banyaknya intervensi-intervensi yang dialami dalam pengambilan tindakan dan keputusan (Hasibuan & Sushanty, 2018).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian kausal. Penelitian kausal yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel penelitian (Santoso, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance dimana dalam penelitian ini diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif sehingga dibutuhkan pengukuran di setiap variabelnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan pertambangan yang terdaftar resmi di BEI dan telah mempublikasikan laporan keuangan pada periode 2017-2021. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif disesuaikan dengan kriteria peneliti yaitu perusahaan pertambangan yang konsisten terdaftar di BEI berturut-turut pada tahun 2017-2021, data yang tersedia lengkap baik data mengenai good corporate governance perusahaan, dan data yang diperlukan untuk mendeteksi penghindaran pajak. Setelah di crosscheck, terdapat 22 perusahaan selama 5 tahun yang memenuhi kriteria listed di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Kemudian didapatkan hasil pengamatan yang menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 110 data. Analisis pertama dalam penelitian ini yaitu deskriptif statistik. Statistic deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Statistik deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari mean, maksimum, minimum dan standar deviasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
PJ	110	-3.44	6.16	.1953	.81095
KI	110	.00	1.00	.6064	.25885
KM	110	.00	.77	.0933	.17772
UD	110	2.00	11.00	4.7364	1.93792
DKI	110	.00	.67	.4148	.12689
KA	110	3.00	5.00	3.1636	.41811
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan Variabel penghindaran pajak (PJ) dari 110 data yang dianalisis diperoleh nilai minimum sebesar -3,44, nilai maksimum sebesar 6,16, nilai mean sebesar 0,1953 dan nilai standar deviasi sebesar 0,81095. Nilai minimal diperoleh perusahaan diperoleh PT. Alfa Energi Investama Tbk periode 2017 sedangkan nilai maksimum diperoleh PT. Darma Hanwa Tbk periode 2020. Berdasarkan nilai dari mean, diketahui bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak, karena pajak yang

dibayarkan semakin kecil dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

Untuk variabel kepemilikan institusional (KI) dari 110 data yang dianalisis diperoleh nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 1,00 nilai mean sebesar 0,6064 dan nilai standar deviasi sebesar 0,25885. Nilai minimal diperoleh perusahaan PT. Bayan Resources Tbk selama periode penelitian sedangkan nilai maksimum yang diperoleh perusahaan PT. Bumi Resources Tbk periode 2018-2019. Berdasarkan nilai mean, diketahui sebagian besar perusahaan pertambangan memiliki proporsi kepemilikan institusional lebih dari 50%. Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, membuat pengawasan institusi pada kinerja manajemen perusahaan semakin tinggi. Untuk variabel kepemilikan manajerial (KM) dari 110 data yang dianalisis diperoleh nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 0,77 nilai mean sebesar 0,0933 dan nilai standar deviasi sebesar 0,17772. Nilai minimal diperoleh perusahaan PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk periode 2020, PT. Baramulti Suksessarana Tbk periode 2017-2019, PT. Bumi Resources Tbk periode 2017-2019, PT. Darma Hanwa Tbk periode 2017-2021, PT. Golden Energy Mines Tbk periode 2017-2021, PT. Garda Tujuh Buana Tbk periode 2017-2021, PT. Harum Energy Tbk periode 2017-2021, PT. Mitrabara Adiperdana Tbk periode 2017-2019, PT. Bukit Asam Tbk periode 2017-2021, dan PT. SMR Utama Tbk periode 2017-2021. Adapun nilai maksimum diperoleh perusahaan PT. Bayan Resources Tbk periode 2017-2021. Berdasarkan nilai mean, diketahui bahwa proporsi kepemilikan pada manajerial dalam perusahaan pertambangan masih di bawah 10%. Hal ini membuat kontribusi kepemilikan manajerial sebagai pemilik kurang berarti, karena sebagian besar pada saham perusahaan dimiliki oleh pihak institusi.

Untuk variabel ukuran direksi (UD) dari 110 data yang dianalisis diperoleh nilai minimum sebesar 2,00, nilai maksimum sebesar 11,00 nilai mean sebesar 4,7364 dan nilai standar deviasi sebesar 1,93792. Nilai minimal diperoleh perusahaan PT. SMR Utama Tbk selama periode penelitian sedangkan nilai maksimum diperoleh perusahaan PT. Bumi Resources Tbk periode 2020-2021. Berdasarkan nilai mean, sebagian besar perusahaan pertambangan juga memiliki jumlah direksi sebesar 5 orang. Terkait jumlah direksi tidak

ada aturan khusus, dimana proporsi dewan direksi disesuaikan dengan kebutuhan atau kapasitas perusahaan. Untuk variabel dewan komisaris independen (DKI) dari 110 data yang dianalisis diperoleh nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 0,67 nilai mean sebesar 0,4148 dan nilai standar deviasi sebesar 0,12689. Nilai minimal diperoleh perusahaan PT. Garda Tujuh Buana Tbk selama periode penelitian sedangkan nilai maksimum diperoleh perusahaan PT. Toba Bara Sejahtera Tbk periode 2019-2021. Berdasarkan nilai mean, diketahui proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan pertambangan mencapai 41%. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan sudah menerapkan prinsip *good corporate governance* yang telah dibuktikan dengan keberadaan dewan komisaris independen.

Untuk variabel dewan komite audit (KA) dari 110 data yang dianalisis diperoleh nilai minimum sebesar 3,00, nilai maksimum sebesar 5,00 nilai mean sebesar 3,1636 dan nilai dari standar deviasi sebesar 0,41811. Sebagian besar perusahaan memiliki komite audit 3 orang, adapun perusahaan yang memiliki komite audit lebih dari 3 orang adalah PT. Bumi Resources Tbk periode 2020-2021 berjumlah 4 orang, PT. Bayan Resources Tbk periode 2017-2021 berjumlah 4 orang, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk periode 2020-2021 berjumlah 4 orang, PT. Bukit Asam Tbk periode 2017-2021 berjumlah 4 orang dan PT. Petrosea Tbk periode 2020-2021 berjumlah 5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan di BEI sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan keberadaan komite audit dalam perusahaan. Perusahaan pertambangan memiliki minimal 3 anggota komite audit, sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No Kep. No.29/PM/2004.

**Tabel 3.** Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Signifikansi	Nilai Kritis	Keterangan
Uji Normalitas			
Sebelum Outlier	0,000	> 0,05	Tidak normal
Sesudah Outlier	0,200		Normal
Uji Multikolinieritas			
KI	Tolerance = 0,453	Tolerance > 0,1	Bebas multikolinieritas
	VIF = 2,209	VIF < 10	

Uji Asumsi Klasik	Signifikansi	Nilai Kritis	Keterangan
KM	Tolerance = 0,415		Bebas multikolinieritas
	VIF = 2,410		
UD	Tolerance = 0,825		Bebas multikolinieritas
	VIF = 1,212		
DKI	Tolerance = 0,850		Bebas multikolinieritas
	VIF = 1,176		
KA	Tolerance = 0,754	Bebas multikolinieritas	
	VIF = 1,327		
Uji Heteroskedastisitas			
KI	0,053	> 0,05	Bebas heteroskedastisitas
KM	0,089		Bebas heteroskedastisitas
UD	0,100		Bebas heteroskedastisitas
DKI	0,753		Bebas heteroskedastisitas
KA	0,354		Bebas heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi			
Durbin Watson Test	DW = 1,823	DU = 1,7758	Bebas autokorelasi
d <sub>U</sub> < d < 4-d <sub>U</sub>		DL = 1,5421	
		4-DU= 2,2242	

Sumber: Output SPSS (2023)

Berdasarkan daritabel di atas, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) test dengan ketentuan jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, dimana hasil ini menunjukkan data tidak terdistribusi normal. Untuk mengatasi masalah tidak terpenuhinya asumsi nomalitas, peneliti melakukan outlier data. Dari hasil transformasi data diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05, dimana dapat dinyatakan data terdistribusi normal. Uji asumsi multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai VIF dan Tolerance dengan ketentuan VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing variabel sudah memiliki nilai VIF dibawah 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 sehingga dinyatakan terhindar dari masalah multikolinieritas.

Uji heteroskedastistas dilakukan dengan menggunakan uji glejser dimana dapat dinyatakan tidak ada masalah heterokedastisitas jika memperoleh nilai signifikansi > 0,05. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai sig-

nifikansi di atas 0,05 sehingga dinyatakan data terhindar dari masalah heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji durbin Watson test, dimana dapat dinyatakan terhindar dari masalah autokorelasi jika memperoleh  $dU < d < 4-dU$ . Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2, diketahui  $DU = 1,7758 < DW = 1,923 < 4-DU = 2,2242$  sehingga dinyatakan data tidak mengalami masalah autokorelasi.

**Tabel 4.** Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>		
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.205	.130	
KI	-.142	.078	-.254
KM	-.097	.114	-.123
UD	.030	.008	.382
DKI	.188	.108	.177
KA	-.031	.035	-.097

a. Dependent Variable: PJ

Sumber: Output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai konstanta sebesar 0,205. Artinya tanpa adanya pengaruh dari variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, dewan komisaris independent dan komite audit, maka nilai variabel penghindaran pajak sebesar 0,205. Pada variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai koefisien sebesar 0,142 dengan nilai negatif. Artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel kepemilikan institusional, akan berdampak penurunan pada variabel penghindaran pajak sebesar 0,142 satuan. Variabel kepemilikan manajerial memperoleh nilai koefisien sebesar 0,097 dengan nilai negatif. Artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel kepemilikan manajerial, akan juga berdampak penurunan variabel penghindaran pajak sebesar 0,097 satuan. Variabel ukuran direksi memperoleh nilai koefisien sebesar 0,030 dengan nilai positif. Artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel ukuran direksi, akan berdampak kenaikan variabel penghindaran pajak sebesar 0,030 satuan.

Variabel dewan komisaris independen memperoleh nilai koefisien sebesar 0,188 dengan nilai positif. Artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel komisaris independen, akan berdampak kenaikan variabel penghindaran pajak sebesar 0,188 satuan. Variabel komite audit memperoleh nilai koefisien sebesar 0,031 dengan nilai negatif. Artinya setiap

kenaikan 1 satuan variabel komite audit, akan berdampak penurunan variabel penghindaran pajak sebesar 0,031 satuan.

**Tabel 5.** Uji Parsial

Variabel	t <sub>hitung</sub>	Signifikansi
KI	-1,816	0,073
KM	-0,845	0,401
UD	3,692	0,000
DKI	1,734	0,087
KA	-0,899	0,371

Sumber: Output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai bahwa Variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,073 > 0,05$ . Artinya secara parsial variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Variabel kepemilikan manajerial memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,401 > 0,05$ . Artinya secara parsial variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Variabel ukuran direksi memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya secara parsial variabel ukuran direksi berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Variabel dewan komisaris independen memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,087 > 0,05$ . Artinya yaitu secara parsial variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Variabel komite audit memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,371 > 0,05$ . Artinya secara parsial variabel komite audit tidak berpengaruh juga secara signifikan terhadap variabel penghindaran pajak.

**Tabel 6.** Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.478	5	.096	5.843	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1.374	84	.016		
	Total	1.852	89			

a. Dependent Variable: PJ

b. Predictors: (Constant), KA, DKI, KI, UD, KM

Sumber: Output SPSS, diolah (2023)

Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai Fhitung sebesar 5,843 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Artinya secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak.

**Tabel 7.** Uji Koefisien Determinasi Berganda ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 <sup>a</sup>	.258	.214	.12789

a. Predictors: (Constant), KA, DKI, KI, UD, KM  
b. Dependent Variable: PJ

Sumber: Output SPSS (2023)

Untuk uji koefisien determinasi berganda diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,258 atau 25,8%. Artinya naik turunnya variabel penghindaran pajak, dapat dipengaruhi oleh variabel simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, dewan komisaris independen dan komite audit sebesar 25,8%, sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui juga bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak,  $H_1$  diterima. Artinya dengan penerapan prinsip good corporate governance yang konsisten dengan adanya pengawasan dari pihak institusional, kepemilikan manajerial yang wajar, proposri direksi yang sesuai dengan kapasitas perusahaan, keberadaan komisaris independensi sebagai pengawasan dari pihak stakeholder serta adanya komite audit yang menjaga kualitas pelaporan keuangan, dapat berdampak pada besar kecilnya praktek penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di BEI. Dari analisis diperoleh nilai minimum sebesar -3,44, nilai maksimum sebesar 6,16, nilai mean sebesar 0,1953 dan nilai standar deviasi sebesar 0,81095. Nilai minimal diperoleh perusahaan diperoleh PT. Alfa Energi Investama Tbk periode 2017 sedangkan nilai maksimum diperoleh PT. Darma Hanwa Tbk periode 2020. Diketahui bahwa masih ada perusahaan yang tidak memiliki beban pajak yaitu PT. Garda Tujuh Buana Tbk karena perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan lain yang tidak

memiliki beban pajak yaitu PT. Golden Eagle Energy Tbk selama periode 2017-2020. Meskipun perusahaan memiliki laba positif pada periode 2017-2019, tetapi perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak.

Hal ini juga menunjukkan masih ada perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Kepatuhan sebagai motivasi individu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Setyawati et al., 2022). Teori ini mengarah pada kepatuhan individu dalam menaati hukum yang ada dengan konsisten dengan norma-norma internal yang ada. Mengacu pada praktik *good corporate governance*, dimana perusahaan yang konsisten dan patuh dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* akan mencapai keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna untuk mencapai nilai pemegang saham. Tata kelola perusahaan juga dianggap sebagai sistem yang lebih mengarah dan mengendalikan perusahaan dengan maksud dan tujuan agar terbentuk keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan agar dapat menjamin kelangsungan eksistensi dan pertanggungjawaban manajemen (Indrati et al., 2021). Tata Kelola pada perusahaan dimaksudkan untuk mengatur hubungan dan meminimalisir adanya kesalahan yang terjadi dan juga segera dapat diperbaiki (Suryanto et al., 2018).

Berdasarkan pada teori *stewardship* keberadaan pada kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit, mampu meningkatkan kepuasan dan kesuksesan perusahaan (Chrisman, 2019). Hal ini juga disebabkan karena perusahaan yang terbebas dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan karena melanggar peraturan, seperti penghindaran pajak. Dalam konteks keagenan, peran pihak ketiga adalah memantau perilaku manajer sebagai agen dan juga memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan keinginan agen. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu bertindak sebagai jembatan antara prinsipal dan prinsipal sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada principal (Hoesada, 2021).

## 2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil dari analisis data, diketahui bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di BEI, H<sub>2</sub> ditolak. Artinya besar kecilnya struktur kepemilikan institusional, tidak berdampak pada besar kecilnya tindakan penghindaran pajak perusahaan. Tidak berpengaruhnya pada kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, dapat disebabkan karena masih ada perusahaan yang tidak memiliki pengawasan institusional salah satunya PT. Bayan Resources Tbk. Kepemilikan institusional sebagai badan kontrol perusahaan mungkin tidak berada dalam posisi yang baik untuk dapat mengarahkan tindakan oportunistik manajemen dalam menerapkan praktik penggelapan pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pemilik institusi masih kekurangan sumber daya. Pemilik institusi menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memantau dan mengontrol keputusan yang dibuat oleh manajer, dan penghindaran pajak terus berlanjut.

Selaras dengan studi yang dilakukan (Zainuddin & Anfas, 2021), dimana pada kepemilikan institusional tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional beranggapan apabila yang dilakukan untuk kesejahteraan dan menguntungkan bagi manajemen dan juga pemilik perusahaan, maka mereka akan mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang dilakukan manajemen, sehingga besar dan kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak berdampak juga pada penghindaran pajak perusahaan. Konsisten dengan studi yang dilakukan (J. V. Putri & Suhardjo, 2021) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional sekaligus menjadi kepemilikan mayoritas dalam perusahaan pertambangan sering memicu adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akan tetapi, mengacu pada teori kepatuhan sebagai motivasi individu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Setyawati et al., 2022). Teori ini mengarah pada kepatuhan



individu dalam menaati hukum yang ada dengan konsisten dengan norma-norma internal yang ada.

### 3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil dari analisis data, diketahui bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di BEI,  $H_3$  ditolak. Artinya besar kecilnya proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan, tidak berdampak pada besar kecilnya tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena masih terdapat perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial disetiap periodenya. Selain itu, proporsi kepemilikan manajerial disetiap tahunnya tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak juga dapat disebabkan karena kepemilikan manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga manajerial tidak memiliki kesempatan atau wewenang dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Selaras dengan studi yang dilakukan (Krisna, 2019), dimana pada kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut teori keagenan, konflik keagenan akan muncul dimana manajer melemahkan kepentingan manajer sendiri dan merongrong kepentingan terbaik manajer dalam hal mengakuisisi perusahaan karena manajer memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemegang saham tetapi juga manajer atau pengelola perusahaan. Konsisten dengan studi yang dilakukan (N. T. Rahmawati & Jaeni, 2022) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, pihak stakeholder selalu ingin mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk pengelolaan dan juga pengoperasian dana investasi dalam usaha (Putra, 2014). Namun dalam praktiknya, agen yaitu manajemen cenderung melakukan kecurangan agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan baik dan juga menguntungkan prinsipal untuk berope-

rasi. Agen dipekerjakan melalui tugas tertentu kepada prinsipal dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada prinsipal atas jasa yang diberikan oleh prinsipal (Sanfelix & Puig, 2018). Hal ini bertujuan agar prinsipal tidak melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya terkait kompensasi.

### 4. Pengaruh Ukuran Direksi Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil dari analisis data, diketahui bahwa ukuran direksi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di BEI,  $H_4$  diterima. Artinya semakin banyak ukuran dewan direksi dalam perusahaan pertambangan, maka tindakan penghindaran pajak mengalami peningkatan. Pada perusahaan direksi mempunyai tugas sebagai mengelola perseroan (Krisnadewi et al., 2020). Direksi mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, dan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Ukuran dewan pada suatu perusahaan berdampak pada penghindaran pajak yang dilakukan. Berdasarkan teori keagenan, ukuran dewan direksi yang kecil akan menunjukkan performa yang lebih tinggi dan juga memberikan jaminan pengawasan. Ukuran direksi yang sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan, akan membantu menerapkan prinsip good corporate governance yaitu akuntabilitas dan kewajaran.

Selaras dengan studi yang dilakukan Putri & Chariri (2017) dimana ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin banyak proporsi dewan direksi, maka potensi penghindaran pajak semakin tinggi. Ukuran direksi yang semakin banyak, akan memicu adanya perbedaan pendapat dan juga munculnya kepentingan lain dalam pengambilan keputusan. Konsisten dengan studi yang dilakukan (Tanujaya & Kaslianto, 2021) yang membuktikan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Good corporate governance sebagai sistem yang diberlakukan dalam perusahaan maupun organisasi yang bertugas mengontrol



dan juga mengarahkan kinerja perusahaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rodriguez-Fernandez, 2016; Tjahjadi et al., 2021). Mengacu pada teori *stewardship* sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan dapat belaku jujur (Torfing & Bentzen, 2020). Jika dilihat dari *theory of planned behavior* adanya sikap, norma subyektif, dan persepsi memengaruhi niat perilaku individu untuk dapat melakukan tindakan maupun mengambil suatu keputusan, baik yang sesuai peraturan maupun yang melanggar peraturan (Bosnjak et al., 2020).

#### 5. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil dari analisis data, diketahui bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan juga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di BEI, H<sub>5</sub> ditolak. Artinya besar kecilnya jumlah komisaris independen dalam perusahaan, tidak mencerminkan pada besar kecilnya tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena masih terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang tidak memiliki komisaris independen. Tidak berpengaruhnya dewan komisaris independen dalam penghindaran pajak, menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam mencegah tindakan manajemen yang tidak mengikuti peraturan. Keberadaan dewan komisaris independen yang ada di perusahaan hanya dapat terjadi dalam kondisi tertentu, tetapi pemegang saham mayoritas tetap berperan penting untuk memastikan aktivitas dewan yang berwenang mewakili tidak akan meningkat.

Selaras dengan studi yang dilakukan (Susanti & Efendi, 2022)) yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori *stewardship* mengansumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Chrisman, 2019). Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principal dan manajemen. Konsisten dengan studi yang dilakukan (Merslythalia & Lasmana,

2017) yang memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan *theory of planned behavior* adanya sikap, norma subyektif, dan persepsi memengaruhi niat perilaku individu untuk melakukan tindakan maupun mengambil suatu keputusan (Bosnjak et al., 2020). Sehingga keberadaan komisaris independen tidak dapat menjamin perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak. Adanya perilaku yang terencana mampu membuat independensi komisaris berkurang, karena akan dapat menambah besaran kompensasi yang telah didapatnya.

#### 6. Pengaruh Komite Audit Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil dari analisis data, diketahui bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan di BEI, H<sub>6</sub> ditolak. Artinya keberadaan komite audit dalam perusahaan, tidak berdampak juga pada tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena keberadaan komite audit dalam perusahaan hanya sebatas pemenuhan regulasi yang ada dan keberadaanya belum memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Komite audit membantu dewan dalam memberi nasihat tentang standar akuntansi dan kontrol internal. Namun, jumlah komite audit tetap tidak menjamin ada atau tidaknya aktivitas kecurangan, yaitu agresivitas pajak. Dalam masalah perpajakan dimungkinkan karena kewenangan delegasi masih terbatas. Jumlah panitia ujian minimal 3 orang pada umumnya hanya dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan resmi.

Selaras dengan studi yang dilakukan (Yuliani & Prastiwi, 2021) yang memperoleh hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Praktik tata kelola perusahaan yang tidak sebagaimana mestinya, tidak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perusahaan dan juga kontribusinya terhadap pemerintah. Tata kelola perusahaan juga dianggap sebagai sistem yang lebih mengarah dan mengendalikan perusahaan dengan maksud dan

tujuan agar terbentuknya keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan agar dapat menjamin kelangsungan eksistensi dan pertanggung jawaban manajemen (Indrati et al., 2021). Konsisten dengan studi yang dilakukan (Devi et al., 2022) yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kehadiran komite audit dalam perusahaan sangat berguna untuk memastikan integritas informasi dalam laporan keuangan manajemen, sehingga harus dapat memastikan integritas laporan keuangan yang disajikan. Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang baik (Wahyudi & Fitriah, 2021). Teori keagenan ini dapat membantu auditor memahami masalah yang timbul antara agen dan principal (Frivaldo et al., 2019). Dalam konteks keagenan, peran pihak ketiga adalah memantau perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan keinginan agen. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu bertindak sebagai jembatan antara prinsipal dan prinsipal sebagai bentuk pertanggung jawaban prinsipal kepada principal (Hoesada, 2021). Namun, pada prakteknya keberadaan komite audit dalam perusahaan masih sebatas pemenuhan regulasi, sehingga belum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan salah satunya penghindaran pajak.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa ukuran direksi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di BEI periode 2017-2021. Limitasi penelitian yaitu, subjek penelitian hanya terbatas pada perusahaan pertambangan dimana perusahaan manufaktur masih memiliki sektor lain, penelitian ini dilakukan hanya menggunakan empat periode yaitu 2017-2021 sehingga memungkinkan memperoleh hasil yang ber-

beda jika dilakukan pada periode lain, dan teknik untuk melakukan normalitas data dalam penelitian ini menggunakan outlier dimana akan memperoleh hasil yang berbeda jika dilakukan teknik lain seperti transformasi LN dan Log10.

##### B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan, maka implikasi manajerial dalam penelitian ini yaitu bagi perusahaan perlu melakukan praktik good corporate governance dengan profesional untuk menjaga kepercayaan publik, dan perusahaan perlu memperhatikan keberadaan ukuran direksi, karena proporsi dewan direksi dalam perusahaan pertambangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Bagi calon investor diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup sebelum melakukan pengambilan keputusan menanamkan modalnya dalam perusahaan, dimana calon investor selain harus melihat prospek perusahaan dimasa depan juga harus melihat sejauh mana kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya yaitu hendaknya menambah faktor lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti ukuran perusahaan, profitabilitas dan struktur modal. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat untuk melakukan penelitian pada perusahaan sektor lain maupun menambah periode penelitian, agar diperoleh hasil yang lebih luas.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.20.100304>
- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>
- Agatha, B. R., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2020). Kepemilikan Manajerial, Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Food and Beverage. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7).

- <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p15>
- Ahmad, N. B. J., Rashid, A., & Gow, J. (2017). Board independence and corporate social responsibility (CSR) reporting in Malaysia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i2.5>
- Amalia, S., Wijaya, A., Darma, D. C., Maria, S., & Lestari, D. (2020). *Underground Economy: Teori & Catatan Kelam*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(2). <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Asiriwa, O., Aronmwan, E. J., Uwuigbe, U., & Uwuigbe, O. R. (2018). Audit committee attributes and audit quality: A benchmark analysis. *Business: Theory and Practice*, 19. <https://doi.org/10.3846/btp.2018.05>
- Asroni, R., Nur, E., & Yuyetta, A. (2019). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Direktur Utama Terhadap Tindakan Pajak Agresif di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Astuti, A. R. T. (2019). *Manajemen Organisasi (Teori dan Kasus)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- bin Hidthiir, M. H., Basheer, M. F., & Hassan, S. G. (2019). The simultaneity of corporate financial decisions under different levels of managerial ownership: A case of pakistani listed firms. *Research in World Economy*, 10(2) Special Issue). <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n2p147>
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Europe's Journal of Psychology*, Vol. 16. <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107>
- Botelho, T., Harrison, R., & Mason, C. (2021). Business angel exits: a theory of planned behaviour perspective. *Small Business Economics*, 57(1). <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00292-0>
- Chrisman, J. J. (2019). Stewardship Theory: Realism, Relevance, and Family Firm Governance. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, Vol. 43. <https://doi.org/10.1177/1042258719838472>
- Davis, P. E., Bendickson, J. S., Muldoon, J., & McDowell, W. C. (2021). Agency theory utility and social entrepreneurship: issues of identity and role conflict. *Review of Managerial Science*, 15(8), 2299–2318. <https://doi.org/10.1007/s11846-020-00423-y>
- Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Hurhayati. (2022). Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2).
- Dewi, S. (2018). Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2). <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1439>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., ... Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Frivaldo, F. S., Sadera, J. M., & Bueno, D. C. (2019). *Harmonizing good governance across barangays in a metropolitan setting* Harmonizing Good Governance across Barangays in a Metropolitan Setting asked the European Centre for Development Policy. (July), 184–191.
- Handriani, E., & Robiyanto, R. (2018). Institutional ownership, independent board, the board size, and firm performance: Evidence from Indonesia. *Contaduria y Administracion*, 64(3).

<https://doi.org/10.22201/FCA.24488410E.2018.1849>

<https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.1.26>

- Hartati, N. (2019). Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Badan sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1.
- Hasibuan, D. H., & Sushanty, L. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2013- 2014. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.60>
- Hilling, A., Lundtofte, F., Sandell, N., Sonnerfeldt, A., & Vilhelmsson, A. (2021). Tax avoidance and state ownership — The case of Sweden. *Economics Letters*, 208, 110063. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.110063>
- Hoesada, J. (2021). *Teori Akuntansi dalam Hampran Historiografis Taksonomis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hsieh, T. Y., Shiu, Y. M., & Chang, A. (2019). Does institutional ownership affect the relationship between accounting quality and cost of capital? A panel smooth transition regression approach. *Asia Pacific Management Review*, 24(4). <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2018.12.002>
- Idris, M., Abu Siam, Y., & Nassar, M. (2018). Board independence, earnings management and the moderating effect of family ownership in Jordan. *Management and Marketing*, 13(2). <https://doi.org/10.2478/mmcks-2018-0017>
- Indrati, M., Hermanto, Purwaningsih, E., Agustinah, W., & Sarikha, A. (2021). Corporate Governance Mechanisms and Possible Financial Statements Containing Fraud. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 4(4), 8609–8621.
- Iwenty, K. I., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Sales Growth, Responsibility, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(1).
- Jaeni, J., Badjuri, A., & Fadhila, Z. R. (2019). Effect of Good Corporate Governance, Profitability and Leverage on Tax Avoidance Behavior Before and After Tax Amnesty. *Atlantis Press*, 86(Icobame 2018).
- Jhang, S. S. (Sherwin), Lin, W. T., & Fang, I. H. (2020). How does firms' integrated market power affect upstream trade credit and institutional ownership? Evidence from Taiwan. *Asia Pacific Management Review*, 25(2). <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2019.08.001>
- Khafid, M., Prihatni, R., & Safitri, I. E. (2020). The effects of managerial ownership, institutional ownership, and profitability on capital structure: Firm size as the moderating variable. *International Journal of Financial Research*, 11(4). <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n4p493>
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2).
- Krisnadewi, K. A., Krisnadewi, K. A., Soewarno, N., & Agustia, D. (2020). Optimum Board Size to Achieve Optimal Performance in Indonesia\*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.231>
- Lamichhane, B. P. (2021). Good Governance in Nepal: Legal Provisions and Judicial Praxis. *Journal of Political Science*, 21(February), 19–30. <https://doi.org/10.3126/jps.v21i0.35260>
- Larasati, D. A., Ratri, M. C., Nasih, M., & Harymawan, I. (2019). Independent audit committee, risk management committee, and audit fees. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1707042>
- Madugba, J. U., Howell, K. E., Nwanji, T. I., Faye, S., Egbide, B. C., & Eluyela, D. F. (2021). Audit committee quality and financial reporting



- in deposit money banks in Nigeria. *Asian Economic and Financial Review*, 11(2).  
<https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2021.112.104.117>
- Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Prediksi Kebangkrutan, Profitabilitas dan Opini Audit Terhadap Nilai Perusahaan. *Forum Ilmiah*, 17(3).
- Majeed, M. K., Jun, J. C., Zia-Ur-Rehman, M., Mohsin, M., & Rafiq, M. Z. (2020). The board size and board composition impact on financial performance: An evidence from the Pakistani and Chinese's listed banking sector. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4).  
<https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO4.81>
- Martínez-Ferrero, J., & Lozano, M. B. (2021). The nonlinear relation between institutional ownership and environmental, social and governance performance in emerging countries. *Sustainability (Switzerland)*, 13(3).  
<https://doi.org/10.3390/su13031586>
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.  
<https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07>
- Muchtar, E. H. (2021). *Corporate Governance: Konsep dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Nanditama, T. A., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 10(4), 1–14.
- Niandari, N., Yustrianthe, R. H., & Grediani, E. (2020). Kepemilikan Manajerial dan Praktik Penghindaran Pajak. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2).  
<https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.250>
- Nurul, P. S., & Rachmawati, N. A. (2020). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *National Conference on Accounting and Auditing*, 2(1).
- Partyka, R. B. (2022). Supply chain management: an integrative review from the agency theory perspective. *Revista de Gestao*, Vol. 29, pp. 175–198.  
<https://doi.org/10.1108/REGE-04-2021-0058>
- Pascual-Fuster, B., & Crespí-Cladera, R. (2022). Optimal board independence with gray independent directors. *BRQ Business Research Quarterly*, 25(2).  
<https://doi.org/10.1177/2340944420940313>
- Purwaningsih, E., & Gulo, Z. G. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Aset dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang. *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 4(2), 157.  
<https://doi.org/10.32663/jaz.v4i2.2439>
- Putra, A. (2014). Pengujian Personal Financial Behavior, Planned Behavior terhadap Self Control Behavior Dengan Theory Planned of Behavior. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 9(1).
- Putri, J. V., & Suhardjo, F. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 6(2), 2527–2953.
- Putri, R. A. H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2).
- Rahmawati, A., Moeljadi, Djumahir, & Sumiati. (2018). The effects of managerial ownership, leverage, dividend policy in minimizing agency problem. *Investment Management and Financial Innovations*, 15(4).  
[https://doi.org/10.21511/imfi.15\(4\).2018.22](https://doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.22)
- Rahmawati, N. T., & Jaeni. (2022). Analisis Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Perputaran Persediaan terhadap Agresivitas Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 19(01), 74–82.  
<https://doi.org/10.36406/jam.v19i01.485>

- Ridwan, R., & Pekerti, R. D. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.36423/jumper.v4i1.961>
- Rodriguez-Fernandez, M. (2016). Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance. *BRQ Business Research Quarterly*, 19(2). <https://doi.org/10.1016/j.brq.2015.08.001>
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3).
- Rumapea, M., Elisabeth, D. M., & Monica, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Karakteristik Komite Audit, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Non Keuangan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 5(2), 136–144.
- Salhi, B., Al Jabr, J., & Jarbou, A. (2020). A comparison of corporate governance and tax avoidance of UK and Japanese firms. *Comparative Economic Research*, Vol. 23. <https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.23>
- Sanfelix, G. N., & Puig, F. (2018). New challenges in franchisor-franchisee relationship. An analysis from agency theory perspective. *Cuadernos de Gestion*, 18(1), 85–102. <https://doi.org/10.5295/cdg.150610gn>
- Santoso, S. (2018). *Mahir Statistik Multivariat dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Schillemans, T., & Bjurström, K. H. (2020). Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5). <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Setiawan, D. A., Wasif, S. K., Husen, I. A., Yuliansyah, R., & Pebriani, W. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10).
- Setyawati, A., Yustika, S., Rusli, A., Wibowo, N. A., Wahyudi, E. J., Sukrispiyanto, S., ... Friyanto. (2022). *Pengantar Perilaku Organisasi: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Silvera, D. L., Hizazi, A., Syurya Hidayat, M., & Rahayu, S. (2022). Financial constraints and corporate governance as moderating variables for the determinants of tax avoidance. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(1). [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(1\).2022.21](https://doi.org/10.21511/imfi.19(1).2022.21)
- Strydom, W. F. (2018). Applying the theory of planned behavior to recycling behavior in South Africa. *Recycling*, 3(3). <https://doi.org/10.3390/recycling3030043>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). *The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable*. 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Suramanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, ... Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Surabaya: Yayasan Kita Menulis.
- Suryanto, R., Siskawati, S. A. D., & Sofyani, H. (2018). Pengaruh Struktur Corporate Governance Dan Risiko Perusahaan Terhadap Fee Audit. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.33558/jrak.v9i1.1364>
- Susanti, & Efendi, B. (2022). Pengaruh Independensi Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Medikonis: Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis*, 13(2), 63–69.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of*

*Accounting Research*, 1(1).  
<https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>

- Tanujaya, K., & Kaslianto, W. (2021). Pengaruh Faktor Karakteristik Demografis Dewan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *CoMBInES-Conference on Management*, 1(1).
- Tjahjadi, B., Soewarno, N., & Mustikaningtiyas, F. (2021). Good corporate governance and corporate sustainability performance in Indonesia: A triple bottom line approach. *Heliyon*, 7(3).  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453>
- Torfin, J., & Bentzen, T. Ø. (2020). Does stewardship theory provide a viable alternative to control-fixated performance management? *Administrative Sciences*, 10(4).  
<https://doi.org/10.3390/admsci10040086>
- Trafalgar, J., & Africa, L. A. (2019). The effect of capital structure, institutional ownership, managerial ownership, and profitability on company value in manufacturing companies. *The Indonesian Accounting Review*, 9(1).  
<https://doi.org/10.14414/tiar.v9i1.1619>
- Tresnawati, R., & Indriani, N. P. (2021). The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance In Mining Corporate Listed On The Idx For The Period 2013-2017. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11).
- Triastuty, S., & Riduwan, A. (2017). Pengaruh Modal Intelektual Dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1).
- Uribe-Terán, C. (2021). Higher taxes at the top? The role of tax avoidance. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 129.  
<https://doi.org/10.1016/j.jedc.2021.104187>
- UUD. (2021). UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Virag, P. (2021). Control in agile Is development projects: Looking beyond agency theory. *Procedia Computer Science*, 181, 1–12.  
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.093>
- Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388–401.  
<https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3885>
- Waluyo, W. (2019). The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance: Empirical Study Of The Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(02).  
<https://doi.org/10.33062/ajb.v2i02.92>
- Widiatmoko, S., & Mulya, H. (2021). The Effect of Good Corporate Governance, Profitability, Capital Intensity and Company Size on Tax Avoidance. *Journal of Sosial Science*, 2(4).  
<https://doi.org/10.46799/jss.v2i4.176>
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1).
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1).  
<https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>
- Zainuddin, & Anfas. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2).  
<https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.918>
- Zandi, G., Singh, J., Mohamad, S., & Ehsanullah, S. (2020). Ownership structure and firm performance. *International Journal of Financial Research*, 11(2).  
<https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n2p293>